

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan(*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan interaksi antar anggota pada sebuah perusahaan, yang menempatkan agen dan prinsipal sebagai pelaku utama (Arifin, 2005). Prinsipal sebagai pemilik modal dan sumber daya ekonomi, sedangkan agen sebagai manajer yang memiliki peran sebagai pengurus dan pengendali sumber daya ekonomi. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan tugas kepada agen, sehingga agen yang menjalankan/bertindak atas nama prinsipal. agen merupakan pihak yang diberikan tugas untuk menjalankan perusahaan.

Principal dan agen terkadang memiliki konflik kepentingan karena *agent* tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal* sehingga memicu biaya keagenan. Biaya keagenan atau *agency cost* adalah suatu upaya untuk menelaraskan system pengendalian perusahaan yang terdiri dari biaya kompensasi insentif atau bonding cost, biaya pemantauan, kerugian residual akibat perbedaan preferensi. Sehingga untuk mengurangi biaya keagenan dan menelaraskan kembali kepentingan berbagai pihak membutuhkan auditor sebagai penengah dari *principal* dan *agen*.

Auditor dalam melaksanakan tugas audit tentu saja juga mendapatkan imbalan atas jasa yang telah diberikan dan diharapkan adanya imbalan yang sesuai dengan hasil kerjanya dari perusahaan yang menggunakan jasanya tersebut. *Audit*

fee atau imbalan jasa disepakati oleh perusahaan dan kantor akuntan publik melalui pertimbangan yang menjadi dasar besarnya *audit fee* tersebut.

2.2 Audit

Menurut Agoes (2004) audit suatu pemeriksaan yang dengan cara kritis dan sistematis yang dilakukan oleh pihak yang independen, laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan, catatan akuntansi dan bukti yang mendukung laporan keuangan tersebut sehingga dapat memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Secara umum, Mulyadi (2009) mengatakan bahwa audit merupakan sebuah pemeriksaan akuntan atau auditing merupakan proses yang sistematis untuk mendapatkan dan melakukan evaluasi bukti yang telah didapat secara objektif tentang sebuah pernyataan-pernyataan yang berisikan sebuah kegiatan dan kejadian ekonomi, hal tersebut yang memiliki sebuah tujuan untuk menjadikan tingkat kesamaan antara pernyataan-pernyataan dengan sebuah kriteria yang sudah ditetapkan, serta menyampaikan dari hasil yang telah diperoleh kepada orang yang menggunakan hasil tersebut.

2.3 Audit Fee

Audit fee menurut mulyadi (2009) *fee* yang diterima oleh akuntan publik setelah melakukan tanggungjawabnya yaitu sebagai auditor dalam proses audit, seorang auditor setelah melakukan pekerjaannya dan mendapatkan sebuah imbalan atau upah yaitu berupa *audit fee*. Auditor bekerja untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan yang sesuai atau memadai sesuai dengan pekerjaan yang telah diterima dan dilakukan oleh auditor.

Besaran *fee* audit yang akan diterima auditor diduga berpengaruh terhadap hasil audit tersebut. Maka dari itu penentuan *fee* audit perlu disepakati oleh kedua belah pihak antara klien atau perusahaan yang akan diaudit laporan keuangannya dengan kantor akuntan publik maupun auditor sehingga kualitas audit memiliki hasil yang baik dan memuaskan sesuai dengan kesepakatan bersama. Seperti yang tertulis di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang telah menetapkan PP No. 2 Tahun 2016 yang membahas mengenai penentuan imbalan jasa audit pada pasal 4 yang mengatakan bahwa ketika memberikan hasil audit, kantor akuntan publik atau KAP berhak mendapatkan imbalan jasa berdasarkan kesepakatan antara akuntan publik dengan kliennya yang tertuang dalam surat perikatan.

Anggota dalam menetapkan imbalan jasa audit harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kebutuhan Klien dan ruang lingkup pekerjaan
- b. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit
- c. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*)
- d. Tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan
- e. Tingkat kompleksitas pekerjaan
- f. Jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan sifatnya untuk menyelesaikan pekerjaan
- g. Sistem pengendalian mutu kantor; dan
- h. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati

Dalam kebijakan penentuan imbalan jasa dalam PP no 2 pasal 5 mengatakan bahwa setiap anggota yang bertindak sebagai pemimpin rekan dan/atau rekan akuntan publik pada KAP harus menetapkan kebijakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya imbalan jasa, kebijakan tersebut yaitu:

1. Besaran tarif imbalan jasa standar per jam (*hourly charge out rate*) untuk masing-masing tingkatan staf auditor
2. Kebijakan penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda dari tarif imbalan jasa standar, dan
3. Metode penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang akan ditagihkan kepada entitas yang dituangkan dalam suatu surat perikatan.

2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menurut Riyanto (2010) memiliki definisi atau sebuah arti bahwa besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dengan dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan sedang (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Menurut UU No. 20 Tahun 2008 mengenai kriteria dari ukuran perusahaan yaitu:

- 1.) Kriteria usaha mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2.) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3.) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sehingga kriteria usaha besar memiliki kekayaan lebih Rp10.000.000.000,00 dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00

Perusahaan besar mempunyai berbagai kelebihan dibanding perusahaan berukuran kecil, keuntungan tersebut antara lain:

1. Ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan *return* membuat perusahaan yang lebih besar dapat memiliki lebih banyak laba.

2. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan dalam hal memperoleh dana dari pasar modal.
3. Ukuran perusahaan menentukan dalam kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*) dalam kontrak keuangan.

Nugrahani (2013) mengatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya *audit fee*. Perusahaan yang besar akan semakin banyak kegiatan operasi atau transaksi yang lebih banyak sehingga auditor harus meluangkan lebih banyak waktu untuk melakukan pekerjaan audit dan membutuhkan waktu yang lama untuk memeriksa transaksi – transaksi tersebut

2.5 Debt to Total Assets

Menurut Kasmir (2014) menyatakan bahwa *Debt to Asset Ratio* (DAR) merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. *Debt to total assets* dapat mencerminkan tinggi atau rendahnya risiko yang ada pada perusahaan tersebut. *Debt to total assets* menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan yang telah dibiayai oleh perusahaan tersebut. Menurut Boynton (2013) signifikansi audit dari *debt to total asset* saldo hutang usaha di luar neraca bermanfaat membandingkannya dengan data industri, penurunan rasio ini yang signifikan menentukan masalah kelengkapan. Rasio ini lebih digunakan oleh pihak yang akan memberikan pinjaman pada perusahaan tersebut apakah perusahaan masih layak untuk diberikan tambahan utang dan menilai kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman. *Debt to total assets* dikaitkan dengan adanya indikasi kesulitan keuangan perusahaan dan dapat menunjukkan kondisi kesehatan suatu perusahaan, menurut Arens dan Loebbecke

(1988) kesulitan keuangan perusahaan mendorong terjadinya salah saji dalam laporan keuangan karena manajemen berupaya menyembunyikan rendahnya kemampuan keuangan perusahaan, perusahaan menyembunyikan kondisi keuangan yang lemah dapat mengakibatkan besarnya risiko perusahaan maka dari itu auditor membutuhkan waktu yang lebih dalam melakukan audit laporan keuangan tersebut sehingga akan mempengaruhi besar kecilnya *audit fee*. Risiko perusahaan didefinisikan suatu keadaan dimana ada kemungkinan – kemungkinan yang membuat kinerja dalam suatu perusahaan menjadi lebih rendah atau kurang daripada apa yang diinginkan oleh perusahaan yang diakibatkan adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti di masa mendatang. Risiko perusahaan menurut Bell et al (2001) memiliki definisi yaitu residual yang pada prinsipnya tidak dapat dieliminasi namun dapat dikurangi pada suatu tingkat tertentu dan tingkat risiko perusahaan harus dipertimbangkan untuk mengukur kinerja audit , Rumus *debt to total assets*:

$$\text{Debt to Total Assets: } \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total Aset}}$$

2.6 Kompleksitas Perusahaan

Kompleksitas perusahaan bisa didefinisikan dengan kerumitan transaksi yang ada pada perusahaan. Menurut Cameran (2005) kompleksitas perusahaan adalah hal terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan, Kompleksitas perusahaan diukur dengan jumlah cabang dan anak perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat banyaknya anak perusahaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut. Anak perusahaan biasanya disebut juga dengan *subsidiary*. Definisi anak

perusahaan adalah suatu perusahaan yang telah dikuasai oleh perusahaan atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui satu atau lebih badan atau perusahaan lainnya. Semakin kompleks perusahaan klien maka akan semakin besar tingkat kerumitan dan akan menambah pekerjaan auditor menjadi lebih kompleks dari perusahaan yang tidak memiliki atau mempunyai anak perusahaan.

Semakin banyak anak perusahaan akan menambah kerumitan suatu transaksi dan akan berpengaruh pada besar atau kecilnya *audit fee* yang akan dikeluarkan. Hal itu disebabkan semakin kompleks klien akan semakin banyak waktu yang dikeluarkan untuk proses audit yang dikerjakan oleh auditor sehingga semakin besar pula *audit fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan.

2.7 Kerangka Konseptual

2.7.1 Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Fee*

Ukuran perusahaan menurut Riyanto (2010) memiliki definisi atau sebuah arti bahwa besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dengan dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini untuk mengukur ukuran perusahaan dapat dilihat dari besarnya total asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sehingga dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut termasuk golongan perusahaan besar atau kecil dan kantor akuntan publik dapat menetapkan *audit fee* yang sesuai dengan tugas yang akan dilakukan oleh auditor untuk perusahaan tersebut.

Menurut Nugrahani (2013) bahwa Ukuran perusahaan merupakan faktor penentu yang paling penting dalam menentukan besar kecilnya *audit fee*. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya *audit fee*. Melakukan audit di perusahaan besar akan membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk meninjau operasi klien karena perusahaan besar memiliki jumlah transaksi yang lebih banyak dan membuat auditor memerlukan banyak waktu dan tenaga dalam mempersiapkan, menganalisa hingga menghasilkan opini audit.

2.7.2 Hubungan *Debt to total asset* terhadap *Audit Fee*

Debt to total asset dapat mencerminkan tinggi atau rendahnya risiko yang ada pada perusahaan. Menurut Arens dan Loebbecke (1988) kesulitan keuangan perusahaan mendorong terjadinya salah saji dalam laporan keuangan karena manajemen berupaya menyembunyikan rendahnya kemampuan keuangan perusahaan, perusahaan menyembunyikan kondisi keuangan yang lemah dapat mengakibatkan besarnya risiko perusahaan mengakibatkan semakin lama pula pengujian substantifnya sehingga auditor membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan audit laporan keuangan. Semakin tinggi risiko perusahaan maka semakin tinggi juga risiko auditor dalam melakukan tugasnya. Hal itu karena semakin banyak kepentingan yang harus dilakukan oleh auditor sehingga akan berpengaruh terhadap *audit fee*.

Menurut Juanita dan Satwiko (2012) *Debt to total assets* yang tinggi meningkatkan risiko kebangkrutan dan akan memunculkan *signal* waspada bagi auditor untuk memberikan perhatian yang lebih karena kemungkinan adanya terjadi kesalahan atau *management fraud* yang membuat auditor akan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Hassan dan Naser (2013) mengatakan bahwa seorang auditor perlu melakukan lebih banyak upaya dengan perusahaan atau klien dengan memiliki kondisi keuangan yang buruk atau kurang baik untuk menghindari tuntutan hukum terhadap perusahaan audit di masa depan, dan dengan demikian, auditor akan membebankan biaya audit yang lebih tinggi, utang yang digunakan dalam sebuah bisnis dapat menguntungkan jika perusahaan tersebut dapat menghasilkan sebuah laba, menurut Gunawan dan Wahyuni (2013) *Debt to total assets* tinggi yang mencerminkan bahwa risiko perusahaan yang ada pada perusahaan tersebut tinggi maka semakin sulit untuk perusahaan memperoleh tambahan pinjaman dikarenakan dikhawatirkan bahwa perusahaan tidak mampu menutupi hutang-hutangnya.

2.7.3 Hubungan Kompleksitas Perusahaan terhadap *Audit Fee*

Hay et al (2008) mengatakan bahwa anak perusahaan mewakili kompleksitas jasa audit yang diberikan yang merupakan rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh klien kantor akuntan publik untuk diaudit. Kompleksitas perusahaan bisa didefinisikan dengan kerumitan transaksi yang ada pada perusahaan tersebut. Menurut Cameran (2005)

kompleksitas perusahaan adalah hal terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan, Kompleksitas perusahaan diukur dengan jumlah cabang dan anak perusahaan.

Menurut Nurdjanti & Pramesti(2018) Induk perusahaan yang memiliki *subsidiary* atau biasa yang disebut dengan anak perusahaan harus membuat laporan keuangan berupa laporan keuangan konsolidasi. Menurut Huri, S., & Syofyan, E. (2019) banyaknya anak perusahaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut akan membuat lingkup audit semakin lebih besar dan semakin rumit transaksi yang dilakukan sehingga akan membuat bertambahnya waktu dan jumlah anggota audit yang bertugas akan semakin lebih banyak dalam melakukan proses audit laporan keuangan konsolidasi perusahaan tersebut sehingga akan mempengaruhi *audit fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Semakin banyak jumlah anak perusahaan akan semakin banyak pula *audit fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan.

2.8 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Debt to total assets*, dan Kompleksitas Perusahaan terhadap *Audit fee* pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2014 - 2018” terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan ini, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel Independen	Objek	Hasil
Hasan (2017)	“Pengaruh kompleksitas audit, profitabilitas klien, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap <i>audit fee</i> ”	Kompleksitas audit, profitabilitas klien, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015	Kompleksitas audit, profitabilitas, klien, ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit
Yulio (2016)	“Pengaruh Konvergensi IFRS, Komite Audit, dan Kompleksitas Perusahaan”	Konvergensi IFRS, Komite Audit, Kompleksitas Perusahaan	Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014	Interaksi antara keahlian komite audit dan frekuensi rapat, ukuran komite audit, kompleksitas perusahaan

				berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit. Sedangkan Konvergensi IFRS tidak memiliki pengaruh terhadap <i>fee</i> audit.
Chandra (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Karakteristik Perusahaan dan Ukuran KAP terhadap <i>fee</i> audit eksternal	Independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas pertemuan dewan komisaris, intensitas pertemuan komite audit, ukuran	Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009 - 2013	Dewan komisaris, ukuran perusahaan, anak perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit, sedangkan independensi dewan komisaris,

		perusahaan, anak perusahaan, Ukuran KAP, Risiko Perusahaan		jumlah dewan komisaris, rapat komite audit, dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit
Wulandari dan Nurmala (2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Rapat Komite Audit, dan Ukuran Komite Audit Terhadap Biaya Audit	Ukuran Perusahaan, Intensitas Rapat Komite Audit, Ukuran Komite	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015	Ukuran perusahaan dan ukuran komite audit memiliki pengaruh positif terhadap biaya audit sedangkan rapat komite audit tidak mempengaruhi biaya audit.
Cristansy dan Ardiati (2018)	Pengaruh Kompleksitas Perusahaan,	Kompleksitas Perusahaan, Ukuran	Perusahaan Manufaktur yang	Kompleksitas tidak berpengaruh

	Ukuran perusahaan, dan Ukuran KAP Terhadap <i>Fee</i> Audit pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2016	Perusahaan, dan Ukuran KAP	Terdaftar di BEI tahun 2012-2016	terhadap <i>audit fee</i> sedangkan Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit
Sanusi dan Purwanto. (2017)	Analisis Faktor yang mempengaruhi Biaya Audit Eksternal	Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Risiko perusahaan, Kompleksitas perusahaan, Jenis industri perusahaan, Ukuran KAP, Audit	perusahaan yang listed di Index Kompas100 yang bergerak dalam sektor non keuangan tahun 2014 – 2015	Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Risiko perusahaan, Kompleksitas perusahaan, Jenis industri perusahaan, Ukuran KAP berpengaruh

		report lag, Ukuran komite audit, Piutang perusahaan, dan Persediaan perusahaan		positif terhadap audit fee sedangkan Ukuran komite audit, Piutang perusahaan, Persediaan perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit fee.
--	--	---	--	---

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Fee*

Riyanto(2010) mendefinisikan bahwa ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Menurut Cristansy dan Ardiati (2018) ukuran perusahaan merupakan salah satu pertimbangan auditor dalam menentukan *audit fee*. Melakukan audit di

perusahaan besar akan membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk meninjau operasi klien karena perusahaan besar memiliki jumlah transaksi yang lebih banyak dan membuat auditor memerlukan banyak waktu dan tenaga dalam mempersiapkan, menganalisa hingga menghasilkan opini audit. Sehingga semakin besarnya perusahaan akan mempengaruhi besarnya *audit fee* yang akan dikeluarkan perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset yang lebih besar menggambarkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil. sama halnya dengan penelitian terdahulu dari Hasan (2017), Wulandari dan Nurmala (2019), serta Sanusi dan Purwanto(2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Audit fee*.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti:

Ha₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*

2.9.2 Pengaruh *Debt to total assets* terhadap *Audit Fee*

Menurut Sukamulja (2019) *debt to asset* penting untuk mengukur risiko bisnis, makin tinggi rasio ini maka makin tinggi risiko bisnis karena pendanaan aset dengan liabilitas lebih besar. *Debt to total assets* dapat mencerminkan risiko perusahaan yang ada dalam perusahaan tersebut. Risiko perusahaan menurut Bell et al (2001) memiliki definisi yaitu residual yang pada prinsipnya tidak dapat dieliminasi namun dapat dikurangi pada suatu tingkat tertentu dan tingkat risiko perusahaan harus dipertimbangkan untuk mengukur kinerja audit. *Debt to total assets* merupakan hal yang dapat mencerminkan risiko

perusahaan tersebut dan dianggap penting dalam penentuan *audit fee*, Jika perusahaan memiliki *Debt to total assets* yang tinggi yang menandakan bahwa risiko perusahaan tersebut tinggi maka semakin besar kompleksitas dan semakin besar risiko audit yang harus dilakukan oleh auditor eksternal karena kemampuan perusahaan untuk menutupi hutang dengan menggunakan aset semakin menurun dan semakin besar nilai aset yang didanai dari hutang. Sama seperti hasil penelitian terdahulu dari Sanusi dan Purwanto (2017) yang mengatakan bahwa risiko perusahaan yang diukur menggunakan *debt to total assets* berpengaruh positif terhadap *audit fee*,

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa *Debt to total assets* berpengaruh positif terhadap *audit fee*, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti:

Ha2: *Debt to total asset* berpengaruh positif terhadap *Audit Fee*

2.9.3 Pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap *Audit Fee*

Menurut Cameran (2005) adalah hal terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan, Kompleksitas perusahaan diukur dengan jumlah cabang dan anak perusahaan. Kompleksitas perusahaan diukur dengan ada atau tidaknya anak perusahaan yang dipunyai oleh suatu perusahaan tersebut. Hay et al (2008) mengatakan bahwa anak perusahaan mewakili kompleksitas jasa audit yang diberikan yang merupakan rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh klien kantor akuntan publik untuk diaudit. Ketika perusahaan tersebut mempunyai anak perusahaan maka akan membuat semakin rumit yang dikarenakan akan semakin banyak transaksi yang dilakukan dan sebuah induk

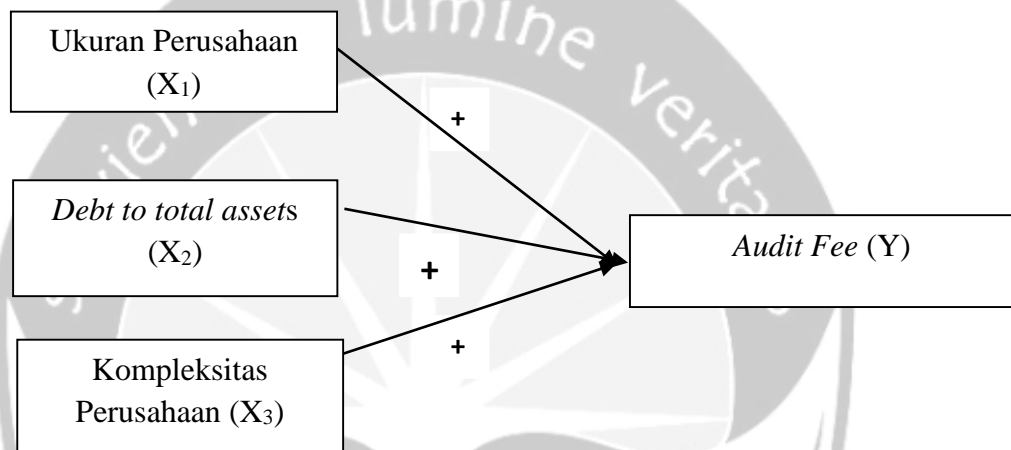
perusahaan harus membuat sebuah laporan konsolidasi. Semakin induk perusahaan memiliki banyak anak perusahaan akan semakin membutuhkan waktu yang lama dalam proses audit laporan keuangan konsolidasi tersebut hal tersebut disebabkan oleh semakin kompleks suatu klien akan semakin sulit dalam mengaudit laporan keuangan konsolidasi tersebut, sama seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulio (2016) serta Sanusi dan Purwanto(2017) yang menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Jumlah Anak Perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti:

Ha₃: Kompleksitas Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Audit Fee*.

2.10 Model Penelitian

Menurut Hartono (2013), model penelitian merupakan sebuah rencana dari sebuah struktur riset yang mengarahkan proses dan hasil riset sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel yang diteliti, maka akan dilakukan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Model Penelitian

Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Debt to total assets*, Kompleksitas Perusahaan Terhadap *Audit Fee* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 - 2018